TINJAUAN HUKUM ASURANSI SYARIAH BERBASIS INVESTASI DALAM HAL EVENEMENT

Jelisye Putri Cennery

Engrina Fauzi

Elwidarifa Marwenny

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Asuransi Dalam pasal 1774 KUHPd dikatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian untung-untungan, disamakan dengan perjudian. Sementara bangsa Indonesia yang mayoritas islam, didalam hukum islam atau syariah judi adalah perbuatan yang diharamkan. Terbukti didalam praktek, tertanggung dalam perjanjian asuransi berkewajiban membayar premi dan tertanggung berkewajiban membayar sejumlah uang pertanggungan atau ganti kerugian kepada tertanggung jika terjadi *evenement* (peristiwa tidak tentu) sebagaimana yang diatur dalam pasal 246 KUHD tersebut. Tertanggung sudah membayar premi tiap bulan sampai habis masa perjanjian asuransi sesuai yang diperjanjikan, namun *evenement* tidak terjadi, premi yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan kepada tertanggung, penanggung mengambil uang premi tersebut tanpa ada pembayaran ganti rugi lagi pada tertanggung dengan alasan *evenement* tidak terjadi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang perlindungan hukum terhadap tertanggung atas premi yang sudah dibayarkan. proposal penelitian ini dipergunakan 2 (dua) pendekatan penyelesaian masalah, yakni pendekatan undang-undang (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan berdasarkan perundang-undangan (*statute approach*) tersebut bertujuan untuk menganalisis bentuk maupun substansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asuransi. Selain itu penelitian ini juga memberikan sumbangan tentang konsep asuransi berbasis syariah dalam hukum positif nasional. Disamping itu urgensi penting lainnya adalah : Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan pedoman untuk menyusun kebijakan-kebijakan tentang perasuransian dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat selaku tertanggung dalam perjanjian asuransi, sehingga melahirkan konsep nasskah akademik dalam penyusunan rancangan undang-undang asuransi yang sampai saat ini masih mengacu pada KUHD (WvK) yang merupakan produk pemerintah kolonial belanda. Akademisi, memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan tentang arti penting perlindungan hukum terhadap tertanggung atau masyarakat dalam perjanjian asuransi dan konsep asuransi berbasis syariah dalam hukum positif nasional. Bagi Masyarakat, khususnya tertanggung dalam perjanjian asuransi supaya mereka terlindungi secara hukum islam atau konsep syariah dan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum ketika konsep syariah tersebut sudah diatur secara tertulis dalam hukum positif.

Kata Kunci : Legal Protection, Investment, Sharia Insurance

Abstract

This study discusses the Insurance in article 1774 of the Criminal Code said that insurance is a chancy agreement, equated with gambling. While the Indonesian majority Muslim nation, in Islamic law or sharia gambling, is an act that is forbidden. Proved in practice, the insured in the insurance agreement is obliged to pay premiums and the insured is obliged to pay a sum of sum assured or compensation to the insured if there is an event (an uncertain event) as stipulated in article 246 of the KUHD. The insured has

paid the premium every month until the insurance agreement expires as agreed, but the event does not occur, the premium that has been paid is not returned to the insured, the insurer takes the premium without paying compensation to the insured on the grounds that the event does not occur. The results of this study are expected to contribute ideas about legal protection to the insured for premiums that have been paid. This research proposal was used 2 (two) problem solving approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach, the statute approach aimed at analyzing the form and substance of legislation related to insurance. In addition, this study also contributed to the concept of sharia-based insurance in national positive law. Besides that, another important urgency is: For the Government, it is expected to provide guidelines for developing insurance policies in order to provide legal protection for the community as insured in the insurance agreement, giving birth to the concept of academic concepts in the drafting of insurance laws to date. still referring to the KUHD (WvK) which is a product of the Dutch colonial government. Academics, contribute ideas and insights about the importance of legal protection against the insured or the community in insurance agreements and sharia-based insurance concepts in national positive law. For the community, especially the insured in the insurance agreement so that they are protected by Islamic law or the concept of sharia and in order to obtain legal certainty when the concept of sharia is regulated in writing in positive law.

Keywords : Legal Protection, Investment, Sharia Insurance

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Asuransi merupakan suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat suatu peristiwa yang belum jelas.¹ Seperti halnya yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), juga dikatakan : Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Hubungan yang terjadi antara yang penanggung dan tertanggung adalah keterikatan yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing satu sama lain. Artinya, sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung wajib membayar premi asuransi kepada tertanggung dan penanggung menerima pengalihan risiko.² Penetapan tingkat premi asuransi harus didasarkan pada perhitungan analisis risiko yang sehat. Besarnya jumlah

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta, Intermassa, 1987, hlm 1

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 9

premi yang harus dibayar oleh tertanggung ditentukan berdasarkan penilaian risiko yang dipikul oleh penanggung.³ Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau tidak berjalan. Premi harus dibayar lebih dahulu oleh tertanggung karena tertanggunglah pihak yang berkepentingan.⁴ Asuransi baru berjalan setelah tertanggung membayar premi sesuai kesepakatan dalam akta asuransi (polis), karena setelah itulah risiko atas benda beralih kepada pihak penanggung. Sehingga, pihak penanggung siap untuk mengeluarkan klaim terhadap tertanggung sesuai polis dan pembayaran premi.

Dalam pasal 1774 KUHPdt dikatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian untung-untungan, disamakan dengan perjudian. Sementara bangsa Indonesia yang mayoritas islam, disalam hukum islam atau syariah judi adalah perbuatan yang diharamkan. Terbukti didalam praktek, tertanggung dalam perjanjian asuransi berkewajiban membayar premi dan tertanggung berkewajiban membayar sejumlah uang pertanggungan atau ganti kerugian kepada tertanggung jika terjadi *evenement* (peristiwa tidak tentu) sebagaimana yang diatur dalam pasal 246 KUHD tersebut. Tertanggung sudah membayar premi tiap bulan sampai habis masa perjanjian asuransi sesuai yang diperjanjikan, namun *evenement* tidak terjadi, premi yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan kepada tertanggung, penanggung mengambil uang premi tersebut tanpa ada pembayaran ganti rugi lagi pada tertanggung dengan alasan *evenement* tidak terjadi. Dalam hal ini jelas tertanggung sangat dirugikan, apakah benar asuransi itu sama dengan judi, berarti haram bagi masyarakat yang mayoritas Islam, sementara tidak ada hukum positif secara tertulis yang mengatur tentang hal ini, bagaimana kepastian hukum itu akan didapat oleh masyarakat khususnya yang menjadi tertanggung dalam perjanjian asuransi.

Karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian secara yuridis normatif tentang Tinjauan Hukum Asuransi Syariah Berbasis Investasi dalam Hal *Evenement*

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimanakah Perlindungan Pemegang Polis hukum asuransi syariah berbasis investasi menurut hukum positif indonesia?
2. Bagaimanakah konsep asuransi berbasis syariah dalam hukum positif indonesia terhadap asuransi sebagai perjanjian untung-untungan yang diatur dalam pasal 1774 KUHPdata ?
3. Bagaimanakah Pelaksanaan *Evenement* dalam Asuransi Syariah

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian dan Pengaturan Asuransi Konvensional

Dalam ketentuan Pasal 246 KUHD, di katakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan dengan mana penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin di-deritanya akibat dari suatu *evenement*.¹⁵

Asuransi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan pihak penanggung mengikat diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung yang timbul dari suatu pembayaran yang di dasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa asuransi merupa-

³ *Ibid*, hlm 105

⁴ *Ibid*, hlm 103

kan sebuah perjanjian mengikat penanggung dan bertanggung dan menimbulkan akibat hukum di antara keduanya.⁵ Sebagai sebuah perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUH Perdata berlaku juga bagi perjanjian asuransi, yaitu pada Pasal 1320 di katakan bahwa terdapat 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian yaitu:¹⁶

2. Tujuan dan Fungsi Asuransi

Pada dasarnya, asuransi bertujuan untuk membagi atau mengalihkan resiko namun seiring berjalannya waktu, asuransi dapat dibagi menjadi dua, yaitu bertujuan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini bertujuan sosial yaitu untuk kesejahteraan anggota dan keamanan sosial, sedangkan tujuan ekonomis yaitu untuk keperluan pembayaran⁶ ganti rugi itu sendiri atau pembayaran premi. Adapun tujuan Asuransi yaitu:¹⁷

1) Teori Pengalihan Risiko

Yaitu untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko yang mengancam bertanggung selaku nasabah dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi.

2) Pembayaran Ganti Kerugian

Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama di dalam polis.

3) Kesejahteraan Anggota

Dalam hal ini bertujuan untuk menolong anggota perkumpulan yang di ambil dari kontribusi (iuran). Sehingga, apabila terdapat anggota yang memerlukan, maka

akan diambil dari uang iuran selaku kontribusi.

4) Pembayaran Santun

Bahwa jika terjadi kecelakaan atau cacat yang di alami oleh nasabah maka, nasabah akan mendapat uang santunan dari kontribusi (semacam premi) dan apabila nasabah meninggal, maka ahli warisnya (dalam hal ini pihak terikat hubungan hukum sendiri dengan nasabah) yang mendapatkan santunan dari penanggung.⁷

3. Objek dan Subjek Asuransi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 246 KUHd dan Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, bahwa objek asuransi dalam hal ini yaitu benda dan jasa, jiwa dan raga kesehatan manusia tanggung jawab hukum, serta kepentingan yang dapat hilang, rusak, rugi atau berkurang nilainya. Sementara itu, yang menjadi subjek asuransi sendiri yaitu nasabah sebagai tertanggung yang membayar premi sebagai usaha pengalihan risiko kepada perusahaan perasuransian sebagai penanggung risiko tersebut.

4. Perjanjian Asuransi

Asuransi merupakan perjanjian untung-untungan (perjanjian kemungkinan atau *overeenkomst*) yang di atur pada pasal 1774 KUHperdata. Asuransi merupakan salah satu perjanjian khusus yang di atur dalam KUHd. Sebagai perjanjian, maka syarat sah perjanjian suatu perjanjian dalam KUHd berlaku juga bagi perjanjian asuransi yang di atur dalam pasal 1320 KUHd. Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain adalah sebagai berikut:¹⁸

1) Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.

2) Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang/ kreditur) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain. (yang berhubungan/ debitur) yang juga berkewajiban

¹⁴*Ibid*, hlm.51

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.8

¹⁶Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit*, hlm. 97

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.12

melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.

Di samping harus mengandung ke-lima unsur perjanjian, perjanjian asuransi harus berisikan unsur lain yang berisikan ciri-ciri khusus dan karakteristik yang menunjukkan ciri khusus dari perjanjian asuransi yang akan membedakan dengan asuransi lain. Prof. Emmy Pangaribuan menjabarkan lebih lanjut bahwa perjanjian asuransi atau pertanggungan itu mempunyai sifat sebagai berikut:¹⁹

- 1) Perjanjian asuransi atau pertanggungan pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian (*shcadeverzeke-ring* atau *indemniteits contract*). Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang di ganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh di derita (prinsip indemnitas).⁸
- 2) Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya di laksanakan kalau peristiwa yang tidak tercatat atas mana di adakan pertanggungan itu terjadi.
- 3) Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi.
- 4) Kerugian yang di derita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan.

Sifat khusus yang di tentukan dalam Pasal 246 KUH Dagang ini memperlihatkan ciri dan karakteristik perjanjian asuransi berbeda dengan perjanjian lainnya. Asas-asas pelengkap lainnya dari perjanjian asuransi di atur dalam pasal-pasal 250, 251, 253, 257, 258, 266 dan seterusnya KUH Dagang.

5. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Syariah

Walau secara jelas mengenai lembaga asuransi tidak di kenal pada masa islam, akan tetapi terdapat aktivitas dari kehidupan pada masa Rasulullah yang mengarah pada masa Rasulullah yang mengarah pada prinsip asuransi yaitu sistem *aqilah*.

Sistem *aqilah* adalah system menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang di kenal sebagai *kunz*.

Bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya.²⁰ Sedangkan keberadaan asuransi syariah di indonesia mulai di bahas pada tanggal 27 juli 1993 oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI)²¹.

TEPATI kemudian melakukan studi banding ke Syarikat Takaful Malaysia pada tanggal 7 sampai 10 september 1993 yang kemudian hasilnya di seminarkan di jakarta pada tanggal 19 oktober. Barulah setelah itu TEPATI merumuskan dan menyusun konsep asuransi takaful serta hal-hal yang di butuhkan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi. Hingga pada tanggal 25 agustus 1994 Asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi.

6. Pengertian dan Pengaturan Asuransi Syariah

Secara umum asuransi islam atau sering diistilahkan dengan *takaful*, *ta'min* dan *tadhamun*. Dapat di gambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu pada ayat Al-Quran yang telah di tuliskan di latar belakang dan As-Sunnah.²²

1. *Takaful* sendiri memiliki arti yaitu saling menanggung atau menanggung bersama. Apabila dimasukkan dalam kehidupan *mu-ammalah*, takaful mengandung arti saling menanggung risiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu lainnya

¹⁸Sri Rejeki Hartono, *Op. Cit*, hlm. 82

¹⁹*Ibid*, hlm. 84

menjadi penanggung atas risiko⁹ Masing masing tanggung-menanggung risiko ter-sebut dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditunjukkan untuk mena-nggung risiko tersebut.

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha peasuransian. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan reasuransi masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah. Untuk memberi kekuatan hukum terhadap Fatwa DSN MUI, perlu di bentuk peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pedoman asuransi Syariah. Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi *takaful* di tegakan atas tiga prinsip utama, yaitu:²³

a) Saling bertanggung jawab

Yang berarti peserta asuransi *takaful* memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

b) Saling bekerjasama atau saling membantu²⁰

Yang berarti di antara peserta asuransi *takaful* yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang di alami karena sebab musibah yang di derita.

c) Saling melindungi penderitaan satu sama lain

Yang berarti bahwa para peserta asuransi *takaful* akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan yang di deritanya. Adapun dasar hukum asuransi syariah dalam hukum Islam sebagai dasar suatu asuransi berdasarkan landasan syariah yaitu:

1) Firman Allah SWT di Dalam Al-Quran Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Quran, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal pada ayat ini seperti *At-Ta'min*, ataupun *Al-Takaful*. Namun demikian meski tidak di jelaskan secara tegas, terdapat ayat-ayat yang menjelaskan konsep dan muatan mengenai asuransi. Seperti perintah Allah SWT untuk mempersiapkan hari depan, di antaranya Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nissa' (4) ayat 9 yang artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (ke-sejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar" Ayat ini menggambarkan kepada manusia yang berfikir tentang pentingnya planning atau perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari depan.²⁴ Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 71 yang artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah;

²⁰Gemala Deqi, *Op.Cit*, hlm. 137

²¹*Ibid*, hlm 140

²²*Ibid*, hlm 136

²³*Ibid*, hlm.146

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat ini menggambarkan bahwa, perlu adanya keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka. Terdapat pula firman Allah yang mengatakan bahwa setiap manusia di perintahkan untuk menghadapi dan merencanakan masa depan sehingga hal ini menepis adanya anggapan lain bahwa asuransi sama dengan menentang *qadha* dan *qadhar* QS.Al-Hasyr (59) ayat 18 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang engkau kerjakan.”

- 2) Hadis Nabi Muhammad SAW Diriwirayatkan oleh Abu Hurairah r.a dia berkata: ”Berselisih dua wanita dari suku Huzail kemudian salah satu wanita melempar batu ke wanita lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang di kandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa¹¹ tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut berupa pembebasan seorang budak perempuan atau laki-laki, dan memutuskan ganti rugi atas kematian wanita tersebut dengan uang darah (*duyat*) yang dibayarkan oleh *aqilah*-nya (Kerabat dari orang tua laki-laki)”*Aqilah* dalam Hadist diatas menunjukkan bahwa penanggungan yang dilakukan oleh kerabat dari orang tua

laki-laki dan dari wanita tersebut menjadi penanggung atas perbuatan wanita tersebut. Ini memperlihatkan adanya unsur saling menanggung antar anggota di dalam suku seperti halnya adanya prinsip saling menanggung dalam asuransi (*Takaful*). Selain itu, Diriwayatkan dan An-Nu'man bin Basyir, Rasulullah saw bersabda: “Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal berkasih sayang dan saling cinta mencintai adalah seperti sebatang tubuh salah satu anggotanya mengadu kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit”

Dari dua hadis di atas dapat dilihat bahwa, setiap manusia diharuskan untuk saling tolong menolong dalam kegiatan di dunia. Selain itu diriwayatkan dari Amirbin Sa'ad bin Aby Waqasy, Rasullah bersabda: “lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya”

2. *Ijtihad* adalah Pengertian tentang asuransi syariah boleh didasarkan pada *ijma* (*Ijtihad*). Penetapan hukum dengan metode *Ijtihad* dapat menggunakan beberapa cara antara lain:¹²
 - 1) Melakukan Interpretasi atau penafsiran hukum secara analogi (*qiyas*), yaitu dengan cara mencari perbandingannya atau pengibaratanya
 - 2) Untuk kemaslahatan umum (*mushalahah mursalah*) yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindarkan *mudharat*.
 - 3) Meninggalkan dalil-dalil khusus dan menggunakan dalil-dalil umum yang ada Dipandang lebih kuat (*Istihsan*)

²⁴Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 21

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 259

- 4) Dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada kecuali terdapat dalil yang menentukan lain (*Istish-hab*)
- 5) Mengukuhkan berlakunya adat ke-peralihan resiko bukan lembaga investasi. biasanya yang tidak berlawanan dengan Jelas ini tidak sesuai dengan perkembangan an Ketentuan syariah.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Pemegang Polis Hu- Asuransi Syariah Berbasis In- vestasi Menurut Hukum Positif In- donesia

Untuk mencapai cita hukum asuransi asuransi tersebut beberapa hal yang relevan adalah mengenai pengaturan masing masing sektor asuransi dalam arti secara hukum dan fungsi pengawasan dalam hal ini pengaturan hukum asuransi berbasis investasi adalah dengan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan.

Menurut hukum perjanjian, aturan asuransi pertama kali diatur mengacu kepada KUHD yang berada pada ranah hukum perdata. Bangsa indonesia yang dijajah belanda wajar ketika pembangunan hukum indonesia masih mengacu kepada hukum belanda karena memang asal mula KUHDPerdata DAN KUHD berasal dari negeri belanda, namun dalam perkembangannya indonesia tidak bisa begitu saja mengadopsi semua aturan hukum belanda. Salah satu contohnya dalam perkembangan praktek hukum dagang prinsip civil law dan common law tidak dapat dipisahkan secara tegas, hal ini sama sekali tidak sesuai dengan karakter dan pertumbuhan bangsa indonesia serta perkembangan global saat ini. Asuransi sebagai suatu perjanjian sampai sekarang masih mengacu kepada KUHD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 246 KUHD. Sedangkan UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang mengatur tentang aspek bisnis dari asuransi.

Dengan peran asuransi tersebut dalam perkembangan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat maka semakin terasa kebutuhan akan hadirnya industri asuransi yang kuat dan dapat diandalkan.

Hakekat asuransi dalam KUHD dituangkan dalam Pasal 246 KUHD. Dalam pasal ini sudah sangat jelas menyatakan bahwa hakekat asuransi adalah lembaga bisnis peasuransian yang menyebabkan perubahan paradigma lembaga asuransi. Sementara pada UU Perasuransian yang ter-baru UU No. 40 Tahun 2014 masih meng-konsepkan asuransi sebagai pembaga peng-alihan resiko, walaupun undang-undang ini pada pasal 5 nya menyebutkan bahwa perluasan ruang lingkup usaha asuransi menjadi kewenangan OJK, sehingga muncul peraturan OJK.

Pada tahun 2016 Penerbitan PJOK yang menjadi amanat undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian rampung dilaksanakan dengan diterbitkannya PJOK No. 69/PJOK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, asuransi syariah, reasuransi dan reasuransi syariah. PJOK ini memberikan ruang bagi perusahaan asuransi untuk menjual produk asuransi berbasis investasi.

Dalam rangka mengoptimalkan peran perusahaan asuransi (syariah, reasuransi dan re asuransi syariah) yang merupakan bagian dari industri pengasuransian untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini adalah salah satu pengaturan yang merupakan penuangan amanat Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian.¹³

Hal ini membuktikan bahwa konsep asuransi semakin berkembang dan semakin meluas ditengah masyarakat. Dibuktikan terjadi perubahan paradigma lembaga asuransi yang semula hanya berfungsi sebagai lembaga peralihan resiko bergeser menjadi lembaga investasi, kemudian asuransi berbasis inventasi yang semula hanya di-

¹³Penjelasan Umum Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/PJOK/2015 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, syariah, reasuransi dan reasuransi syariah.

laksanakan oleh asuransi jiwa, ke depan akan dilaksanakan oleh asuransi umum yang dibuktikan dengan PJOK 69/PJOK/05/2016, yang membolehkan asuransi umum menjual asuransi berbasis investasi.

Untuk dapat menjual produk investasi, perusahaan asuransi harus menjamin keamanan pemegang polis. Hitungan yang didapat dari pemegang polis apakah lebih besar dari pada mendapatkan dana di bank. Sebab, jika hasilnya sama saja, nasabah cenderung memilih produk bank.

Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (1) No. 69/RPJOK.05/2016 dinyatakan perusahaan asuransi umum, atau perusahaan asuransi syariah yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada PAYDI wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar Rp. 250 M untuk perusahaan asuransi umum
- b) Memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar Rp. 150 M untuk perusahaan asuransi umum syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi umum
- c) Memiliki tenaga aktuaris
- d) Memiliki pengelola investasi
- e) Memiliki sistem informasi yang memadai
- f) Memiliki sumber daya pendukung yang memadai

Ketentuan diatas adalah sebagai upaya meningkatkan kinerja perusahaan asuransi dalam rangka mewujudkan perkembangan praktik asuransi yang sehat dalam memberikan kepuasan kepada pemegang polis sebagai konsumen dari asuransi.

Konsep pengaturan asuransi berbasis investasi ke depan dalam rangka mendapatkan kepastian aturan, kepastian kelembagaan maka perlu diatur dengan PJOK tersendiri yang khusus mengatur asuransi berbasis investasi, sehingga tidak terjadi penyelundupan hukum terkait pengaturan asuransi berbasis investasi.

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang handa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran institusi ke-

uangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada industri keuangan.¹⁴

2. Konsep Asuransi Berbasis Syariah Dalam Hukum Positif Indonesia Terhadap Asuransi Sebagai Perjanjian untung-untungan.

Konsep asuransi syariah didasarkan pada Ayat Al quran surat Al maidah ayat 2 yang artinya: “tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam membuat dosa dan pelanggaran”.¹⁵

Berdasarkan konsep tersebut, Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pengertian asuransi syariah Pasal 1 ayat 1 fatwa Dewan syariah Nasional MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001, menetapkan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset/tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai syariah.¹⁶

Konsep asuransi syariah tolong menolong dalam kebajikan ini dimuat dalam hukum positif dengan model perundang-undangan. Sebagaimana sudah dirumuskan dalam undang-undang no. 14 Tahun 2014 tentang perasuransian. Diatur pada Pasal 1 bab 1 angka 2:

Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a) Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian,

¹⁴ Penjelasan Umum PJOK Perlindungan Konsumen dalam uswaatun hasanah, kumpulan karya tulis OJK, 2016, hal 204

¹⁵ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet Kelima, Citra Aditya Bakti Bandung, 2011, hal 263

¹⁶ *Ibid.*

kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ke tiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadi peristiwa tidak pasti

- b) Memberikan pembayaran yang didasarkan kepada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan berdasarkan hasil pengelolaan dana.

Munculnya asuransi syariah memberikan alternatif baru bagi umat islam di indonesia. faktor gharar, maisir, dan riba yang meragukan umat islam akan tereliminasi dengan sistem syariah. Dengan semakin berkembangnya usaha asuransi syariah di indonesia dengan sendirinya berdampak daengan perekonomian di indonesia. Pada pasal 87 UU no. 40 tentang persuransian menyatakan bahwa asuransi syariah harus ditetapkan secara full fledged. Ketentuan diatas ini akan banyak menentukan arah masa depan usaha perasuransian syariah di indonesia, karena kedepan tidak bisa lagi perusahaan asuransi konvensional menjual produk asuransi syariah ke nasabahnya

Dalam hal ketentuan syariah, asuransi syariah dibatasi dalam kegiatannya oleh larangan-larangan syariah, diantaranya larangan menggunakan praktek riba dalam bentuk apapun, menghindarkan praktek perjudian, ketidak pastian dan ketidak jelasan (maisir, gharar dan jahalah) selain itu dalam konteks hukum di indonesia, asuransi syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi kesesuaian praktek perusahaan asuransi dengan ketentuan syariah.¹⁷

- a) Menghindari unsur riba
b) Menghindarkan unsur judi (maisir)
c) Menghindari unsur penipuan (gharar)

Dalam asuransi konvensional ada dana hangus, dimana peserta yang tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin

mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana peserta itu hangus. Demikian pula asuransi non tabungan atau asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim maka premi yang dibayarkan akan hangus sekaligus menjadi milik asuransi.¹⁸

Kalau kita analisis ke asuransi konvensional jelas ini mengandung unsur riba dan ketidak jelasan, sedangkan asuransi berbasis investasi pada syariah dilakukan dengan operasional pola bagi hasil, jelas dana mana yang harus diberikan kepada tertanggung yang mengalami peristiwa tidak tentu dengan berlandaskan kesukarelaan para pemegang polis pada perusahaan asuransi tersebut.

Hal ini sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional No. 21/DSN/MUI/X/2001, tentang landasan hukum asuransi syariah di indonesia.¹⁹ asuransi syariah ini baru diatur dalam perundang-undangan dengan keluarnya UU No. 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian. Asuransi syariah ini didalam undang-undang perasuransian tersebut sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya dimana asuransi syariah ini dikelola berdasarkan prinsip syariah. Asuransi syariah yang dikelola berdasarkan prinsip hukum islam sangat sesuai dengan jiwa bangsa indonesia yang mayoritas beragama islam.

Dalam asuransi syariah, tidak menganal peralihan resiko (transfer of risk) tapi yang digunakan adalah pembagian resiko (sharing risk). dengan konsep pembagian resiko yang saling menanggung resiko adalah para peserta itu sendiri bukan perusahaan asuransi, sehingga perusahaan asuransi bukan sebagai penanggung tapi sebagai pemegang amanah, juga peserta tidak membeli polis tapi memberikan donasi (tabarru') yang diniatkan untuk saling to-

¹⁷Syakir sula, *Asuransi Syariah, Konsep Dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004, hal 293-319

¹⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekosinia, Yogyakarta, 2003, hal, 118

¹⁹Muhamad Firdaus dkk, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Renaisan, Jakarta, 2005, hal. 105

long menolong diantara peserta jika terjadi musibah. Juga tidak terjadi pengalihan kepemilikan dana yang ada adalah pengumpulan dana atau pooling of fund.

konvensional yaitu mencari ridho Allah untuk dunia akhirat. Dua konsep dasar asuransi syariah adalah alquran dan hadis. Konsep tersebut ditersebut diterapkan secara konsisten dalam sistem operasional asuransi syariah, sehingga menciptakan sistem asuransi yang islami dalam tujuan mewujudkan dan pola dan tatanan ideal membawa rahmat dan kemaslahatan bagi manusia secara universal.

Mekanisme akad mudharabah dalam perusahaan asuransi syariah terkait dengan pengelolaan dana menggunakan dua pendekatan yaitu;

- a. pengelolaan dana dengan unsur tabungan (dana investasi) Setiap peserta wajib membayar premi secara tertentu kepada perusahaan. Perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang bisa dibayarkan, pada prinsipnya pembayaran premi tergantung kemampuan peserta, setiap peserta dapat membayar premi secara langsung atau dalam pembayaran giro. Melalui sistem ini setiap premi takapful yang telah diserahkan pada perusahaan asuransi akan dimasukkan ke dalam dua rekening terpisah yaitu rekening khusus tabarru' (participant special account), yaitu rekening yang diniatkan untuk kebaikan apabila ada diantara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia dan mengalami musibah, dan rekening tabungan (participat account) yang dimiliki peserta takapful. Kumpulan dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan asuransi syariah diinvestasikan pada pembiayaan pembiayaan yang dibenarkan secara syariah.

Ada 3 kemungkinan manfaat yang diterima oleh peserta asuransi jiwa syariah :

1. Apabila peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), maka ahli waris akan menerima

- a) pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.

- b) Sisa saldo angsuran premi yang harusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungannya, dan untuk tujuan ini diambilkan rekening terbaru para peserta yang memang disediakan untuk itu.

2. Apabila peserta masih hidup sampai selesainya masa pertanggungan maka yang bersangkutan akan menerima seluruh premi yang telah disetorkan ke rekening peserta, ditambah dengan bagi hasil apabila selama menjadi investasinya mendatangkan keuntungan.²⁰

Kehalalan asuransi didasarkan pada pertimbangan praktiknya menjauhkan dari sistem riba, gharar, jahalah, dan qimar. Asuransi syariah menggunakan sistem persekutuan dan pertolongan (syirkah wa ta'dwuniyyah) praktek ini dibenarkan menurut agama, bahkan didorong untuk saling menolong dalam taqwa dan kebaikan.²¹

Asuransi berbasis investasi pada asuransi syariah ini sangat jelas mekanisme keuangannya. Dimana premi yang digunakan untuk investasi akan bisa diambil oleh peserta asuransi syariah ini karena pada hakekatnya asuransi ini berlandaskan pada hukum Islam yang merupakan ketaentuan dari penguasa alam sang pencipta Allah SWT. Hal ini sangat berbeda dengan produk hukum.

Pada hakekatnya hukum merupakan produk manusia dalam membangun dunianya, yang bisa ditelaah melalui interaksi yang berlangsung dimasyarakat. Dalam artian, hukum itu dilahirkan oleh manusia dan untuk menjamin kepentingan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Sudjono dirdjosowono, *Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. xv

dan hak-hak manusia. Hukum secara positif sudah mengakui keberadaan asuransi syariah yang memakai prinsip hukum islam. Sebagian besar rakyat indonesia terdiri dari pemeluk islam. Oleh karena itu hukum islam mempunyai peranan penting dalam membentuk dan membina ketertiban sosial umat islam dalam mempengaruhi segala segi kehidupannya, maka jalan yang terbaik yang dapat ditempuh adalah mengusahakan secara ilmiah adanya transformasi norma-norma hukum islam kedalam hukum nasional sepanjang sesuai dengan pancasila dan undang-undang dasar 1945 dan relevan dengan kebutuhan hukum khusus umat islam.

b. Pengelolaan dana bukan unsur tabungan (tabarru')

Dana yang tidak mengandung unsur tabungan akan disimpan pada rekening tabarru' oleh perusahaan pada suatu rekening khusus. Berbeda dengan unsur tabungan, dana klaim yang diberikan melalui rekening tabarru' sejak awal diniatkan oleh semua peserta asuransi syariah untuk kepentingan tolong menolong yang dikeluarkan apabila :

1. Peserta meninggal dunia
2. Perjanjian telah berakhir

Setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan derma/tabarru' dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri. Premi takaful akan dikelompokkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian di investasikan kedalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang sesuai dengan syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta kemudian dikurangi beban asuransi (klaim, premi asuransi). bila terdapat sisa akan dibagikan menurut prinsip mudharabah. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah se-

suai dengan penyertaannya. Sedangkan keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.²²

3. Pelaksanaan *Evenement* dalam Asuransi Syariah

Dalam hukum asuransi, terdapat istilah "risiko". Risiko yang dialihkan dari bertanggung kepada penanggung bisa dimaknai sebagai kemungkinan terjadinya kerugian sekaligus batalnya sebagian atau keseluruhan keuntungan yang diharapkan, yang keberadaannya disebabkan oleh suatu kejadian luar biasa dan tidak terprediksikan sebelumnya, atau bisa pula dikatakan berada di luar kekuasaan manusia.

Peristiwa yang tidak terduga disebut sebagai *Evenemen* yaitu suatu peristiwa yang keberadaannya tidak terduga atau peristiwa yang keluar dari kondisi normal, atau bisa pula dipahami sebagai sesuatu yang keberadaannya tidak bisa dipastikan akan terjadi. Seandainya hal itu pun bisa diprediksikan akan terjadi, semisal kematian, tetapi waktu kedatangannya tidak bisa diprediksi.

Peristiwa semacam itu bisa pula berupa sesuatu yang keberadaannya tidak diharapkan terjadi. Akan tetapi, apabila terjadi, maka akan menimbulkan kerugian bahkan bisa pula membatalkan keuntungan

Evenemen dalam asuransi adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi, Jika terjadi juga mengakibatkan kerugian.

Ciri-ciri *evenemen* yaitu:

- a) Peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian
- b) Terjadinya itu tidak diketahui, tidak dapat diprediksi lebih dahulu
- c) Berasal dari faktor ekonomi, alam, dan manusia
- d) Kerugian terhadap diri, kekayaan, dan tanggung jawab seseorang.

²²*Ibid*, hal. 111

Dalam asuransi jiwa yang dimaksud dengan bahaya adalah meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan. Meninggalnya seseorang itu merupakan hal yang sudah pasti, setiap makhluk bernyawa pasti mengalami kematian. Akan tetapi, kapan meninggalnya seseorang tidak dapat dipastikan. Inilah yang disebut peristiwa tidak pasti (evenemen) dalam asuransi jiwa. Evenemen ini hanya 1 (satu), yaitu ketidakpastian kapan meninggalnya seseorang, sebagai salah satu unsur yang dinyatakan dalam definisi asuransi jiwa. Dengan begitu, maka tidak perlu dicantumkan dalam polis. Ketidakpastian kapan meninggalnya seorang tertanggung atau orang yang jiwanya diasuransikan merupakan risiko yang menjadi beban penanggung dalam asuransi jiwa.

Evenemen meninggalnya tertanggung itu bersisi 2 (dua), yaitu meninggalnya itu benar-benar terjadi dalam jangka waktu asuransi, dan benar-benar tidak terjadi sampai jangka waktu asuransi berakhir. Keduanya menjadi beban penanggung.²³

Menurut ketentuan Pasal 306 KUH Dagang, apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur, meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain. Kata-kata bagian terakhir pasal ini "kecuali jika diperjanjikan lain" memberi peluang kepada pihak-pihak untuk memperjanjikan menyimpang dari ketentuan pasal ini, misalnya asuransi yang diadakan itu tetap dinyatakan sah asalkan tertanggung betul-betul tidak mengetahui telah meninggalnya itu. Pasal 306 KUH Dagang ini mengatur asuransi jiwa untuk kepentingan pihak ketiga, yang berbunyi apabila orang yang mengasuransikan jiwanya bunuh diri atau dijatuhi hukuman mati, maka asuransi jiwa itu gugur.

Pada saat tertanggung sudah menyelesaikan sekaligus memenuhi kewajibannya, maka pada saat bersamaan dirinya

memiliki hak untuk memperoleh penyelesaian ganti rugi berdasarkan dengan syarat-syarat polis. Penyelesaian ganti rugi tersebut tidak dibenarkan untuk ditahan oleh pihak pengganggu hanya dengan berdasarkan pada alasan masih menunggu recovery dari hasil penggunaan hak subrogasi maupun hak kontribusi.

Menurut Abdul Muis, hak-hak dari tertanggung itu antara lain:

1. Hak untuk menunjuk orang yang akan menerima uang pertanggungan
2. Hak untuk merubah siapa-siapa yang menjadi tertunjuk dalam batas-batas tertentu
3. Hak untuk menebus kembali polis
4. Hak untuk mengubah polis menjadi bebas premi
5. Hak untuk mengadakan pengawasan terhadap penanggung
6. Hak untuk menggadaikan polis.²⁴

Penanggung adalah perusahaan asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau matinya seseorang yang diasuransikan. Dengan memberikan sejumlah premi oleh tertanggung kepada penanggung, maka risiko telah beralih kepada pihak penanggung. Dalam hal ini penanggung harus bertanggung jawab untuk memberikan pengalihan risiko kepada tertanggung.

Tanggung jawab penanggung di antaranya adalah:

1. Memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut. Hal ini terdapat didalam pengertian asuransi atau pertanggungan dalam Pasal 246 KUH Dagang. Pasal ini mengatakan bahwa seorang penanggung yang mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada ter-

²³ Anonim, *Hukum Asuransi*. Dalam : <http://hukumasuransi.blogspot.co.id/2009/01/asuransi-jiwa.html>. diakses pada tanggal 2 April 2016.

²⁴ Abdul Muis, *Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*, Fakultas Hukum USU Medan, 2005, hal. 66

tanggung karena suatu hal kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Dalam hal asuransi berganda, pada Pasal 277 KUH Dagang meng-atakan bahwa jika terjadi perjanjian yang berhubungan dengan asuransi berganda atas benda yang sama dengan kepentingan yang sama dan untuk waktu yang sama, dan harga pertanggung-penuh telah ada pada penanggung yang pertama, maka penanggung kedua di-bebaskan. Penanggung kedua hanya ber-tanggung jawab untuk pemenuhan ke-kurangan harga pertanggung-an apabila dalam pertanggung-an pertama tidak di-pertanggungkan harga sepenuhnya.

2. Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung; Dalam hal ini Pasal 257 mengatakan bahwa perjanjian per-tanggung-an diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban ke-wajiban bertimbal balik dari si penang-gung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polis-nya ditandatangani. Ditutupnya perjanji-an menerbitkan kewajiban bagi si pe-nanggung untuk menandatangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkannya kepada si tertang-gung. Pasal 259 mengatakan bahwa apa-bila suatu pertanggung-an ditutup lang-sung antara si tertanggung, atau seorang yang telah diperintahnya untuk itu atau mempunyai kekuasaan untuk itu, dan si penanggung, maka haruslah polisnya da-lam waktu 24 jam setelah dimintanya di-tandatangani oleh pihak yang tersebut terakhir ini, kecuali apabila dalam ke-tentuan undang-undang dalam suatu hal tertentu, ditetapkan suatu jangka waktu yang lebih lama. Kemudian Pasal 260 mengatakan bahwa apabila pertanggung-an ditutup dengan perantaraan seorang makelar, maka polis yang telah ditanda-tangani harus diserahkan dalam waktu delapan hari setelah ditutupnya perjanji-an.
3. Mengembalikan premi kepada tertang-gung jika asuransi batal atau gugur,

dengan syarat tertanggung belum me-nanggung risiko sebagian atau seluruh-nya; Dalam hal ini Pasal 281 berbunyi dalam segala hal di mana perjanjian per-tanggung-an itu untukseluruhnya atau sebagian gugur atau menjadi batal, se-dangkan si tertanggung telah bertindak dengan itikad baik, maka si penanggung diwajibkan mengembalikan preminya untuk seluruhnya, ataupun untuk sebagi-an yang sedemikian untuk mana ia tidak telah menghadapi bahaya.

4. Agar perjanjian asuransi terlaksana de-ngan baik, maka masing-masing pihak dituntut untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan itikad baik yang me-rupakan prinsip penting dalam perjanjian pada umumnya sebagaimana tertulis da-lam Pasal 1338, ayat (3) KUH Perdata; Pada prinsip ini para pihak dituntut un-tuk melaksanakan perjanjian dengan iti-kad baik agar tidak menyebabkan suatu kerugian baik pihak tertanggung maupun penanggung. Dalam hal ini penanggung bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang jujur, benar, dan jelas mengenai pertanggung-an yang diberikan kepada tertanggung.
5. Memberikan uang santunan kepada pe-nikmat dalam hal meninggalnya ter-tanggung sesuai dengan kesepakatan ya-²⁵ng tercantum dalam polis.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hakekat asuransi dalam KUHD dituang-kan dalam Pasal 246 KUHD. Dalam pasal ini sudah sangat jelas menyatakan bahwa hakekat asuransi adalah lembaga peralihan resiko bukan lembaga inves-tasi. Jelas ini tidak sesuai dengan per-kembangan bisnis peasuransian yang menyebabkan perubahan paradigma lem-

²⁵Penikmat yang dimaksud adalah orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau orang yang menjadi ahli warisnya sebagai yang berhak menerima dan menikmati santunan sejumlah uang yang dibayar oleh penanggung. Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 200

- baga asuransi. Sementara pada UU Perasuransian yang terbaru UU No. 40 Tahun 2014 masih mengkonsepkan asuransi sebagai pembaga pengalihan resiko, walaupun undang-undang ini pada pasal 5 nya menyebutkan bahwa perluasana ruang lingkup usaha asuransi menjadi kewenangan OJK, sehingga muncul peraturan OJK.
- b. konsep asuransi semakin berkembang dan semakin meluas ditengah masyarakat. Dibuktikan terjadi perubahan paradigma lembaga asuransi yang semula hanya berfungsi sebagai lembaga peralihan resiko bergeser menjadi lembaga investasi, kemudian asuransi berbasis inventasi yang semula hanya dilaksanakan oleh asuransi jiwa, ke depan akan dilaksanakan oleh asuransi umum yang dibuktikan dengan PJOK 69/PJOK/05/2016, yang membolehkan asuransi umum menjual asuransi berbasis investasi.
 - c. Dalam asuransi jiwa yang dimaksud dengan bahaya adalah meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan. Meninggalnya seseorang itu merupakan hal yang sudah pasti, setiap makhluk bernyawa pasti mengalami kematian. Akan tetapi, kapan meninggalnya seseorang tidak dapat dipastikan. Inilah yang disebut peristiwa tidak pasti (evenemen) dalam asuransi jiwa. Evenemen ini hanya 1 (satu), yaitu ketidakpastian kapan meninggalnya seseorang, sebagai salah satu unsur yang dinyatakan dalam definisi asuransi jiwa. Dengan begitu, maka tidak

perlu dicantumkan dalam polis. Ketidakpastian kapan meninggalnya seorang tertanggung atau orang yang jiwanya diasuransikan merupakan risiko yang menjadi beban penanggung dalam asuransi jiwa. Evenemen meninggalnya tertanggung itu bersisi 2 (dua), yaitu meninggalnya itu benar-benar terjadi dalam jangka waktu asuransi, dan benar-benar tidak terjadi sampai jangka waktu asuransi berakhir. Kedua-duanya menjadi beban penanggung.

2. Saran

- a. Untuk dapat menjual produk investasi, perusahaan asuransi harus menjamin keamanan pemegang polis. Hitungan yang didapat dari pemegang polis apakah lebih besar daripada mendapatkan dana di bank. Sebab, jika hasilnya sama saja, nasabah cenderung memilih produk bank.
- b. Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya; Dalam hal ini Pasal 281 berbunyi dalam segala hal di mana perjanjian pertanggungan itu untkseluruhnya atau sebagian gugur atau menjadi batal, sedangkan si tertanggung telah bertindak dengan itikad baik, maka si penanggung diwajibkan mengembalikan preminya untuk seluruhnya, ataupun untuk sebagian yang sedemikian untuk mana ia tidak telah menghadapi bahaya.

Daftar Pustaka

- A. Abbas Salim, Dasar dasar Asuransi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
Abdul aziz dahlan dkk, ensiklopedi Hukum Islam, Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996
Abdul Ghafar Anshori, Asuransi Syariah di Indonesia, UII Press Yogyakarta, 2007
Abdul Kadir Muhamad, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Cetkan kelima, Bandung 2011.